



ບົຍນົກຮຸກຮຽງປຽບປັກຮຸກນີ ທາລິນີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນສຳລັບ ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທາລິນີ ສຳລັບສຳຄັນ

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

ຄະນະສຳຄັນສຳຄັນ ທາລິນີ ທາລິນີ ທາລິນີ (ບົຍນົກຮຸກຮຽງປຽບປັກຮຸກນີ) ທາລິນີ ທາລິນີ (ບົຍນົກຮຸກຮຽງປຽບປັກຮຸກນີ) ທາລິນີ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id) , email : [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; dan
  - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
  - b. penyajian data dan informasi melalui website [diskominfosbaliprov.go.id](http://diskominfosbaliprov.go.id) dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
  - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
  - c. menyusun laporan layanan informasi publik
- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali.  
pada tanggal 5 Mei 2023  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK,



GEDE PRAMANA  
NIP. 19680531 199703 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- C. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Koordinator : Kepala Bidang Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
3. Sandiman Ahli Muda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
4. Analis Organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
5. Sandiman Ahli Pertama, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
- D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi  
Koordinator : Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
2. Arsiparis Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
4. Tenaga Administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

E. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Anggota : 1. Pranata Humas Ahli Madya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
2. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
3. Analis Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
4. Pranata Humas Ahli Pratama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
5. Tenaga Administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Anggota : 1. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
2. Sandiman Ahli Muda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
3. Analis Data dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
4. Statistisi Ahli Muda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
5. Tenaga Administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali



KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002